

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus: Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata)

Gallex Simbolon, Yosef Raimondo Lewowerang

¹PLS, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang-NTT

Email: gallex@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Hasil analisis menunjukkan bahwa Implementasi dana desa mencakup komunikasi, sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, komitmen serta birokrasi. Adanya Peran dan tanggung jawab pemerintah desa, aparat desa maupun masyarakat dalam mengelola dana desa berdasarkan pada mekanisme dan program-program yang dianggarkan. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa baik secara eksternal maupun internal. Tantangan secara eksternal berupa perubahan regulasi yang menyulitkan penyiapan dokumen-dokumen. Tantangan secara internal lebih menjurus kepada ke siapan dokumen persyaratan guna melaku kanproses pencairan danrealisasi anggaran. Ada juga hambatan yang dihadapi yaitu secara internal ialah terkait peraturana tauregulasi yang sering menjadi hambatan dalam proses pencairan dana desa. Secara eksternal yaitu kesulitan yang dihadapi terkait proses pencairan ataupun realisasi kepada sasaran penerima anggaran. Selain itu ada juga proses evaluasi pengeloalan dana desa yang terdiri dari proses evaluasi, mekanisme koordinasi dan konsultasi, peran di desa sebagai anggota masyarakat, pengetahuan tentang dana desa dan pengelolaan dana desa. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu Perlunya peningkatan kompetensi melalui sosialisasi internal terhadap setiap Stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan dana desa, perlunya merevisi mekanisme dana lurpengelolaan dana desa pada tingkat desa sehingga realisasi anggaran menuai kepuasan masyarakat sebagai sasaran dan perlunya transparans iterkait evaluasi penggunaan dana desa.

Kata kunci: Implementasi, Manajement, Program, dan Anggaran.

ABSTRACT

The results of the analysis show that the implementation of village funds includes communication, resources, both natural and human resources, commitment and bureaucracy. The roles and responsibilities of the village government, village officials and the community in managing village funds are based on budgeted mechanisms and programs. The challenges and obstacles faced in managing village funds both externally and internally. External challenges are in the form of regulatory changes that make it difficult to prepare documents. Internal challenges are more directed to the readiness of the required documents to carry out the process of disbursing and realizing the budget. There are also obstacles faced, namely internally related to regulations or regulations that often become obstacles in the process of disbursing village funds. Externally, namely the difficulties encountered related to the process of disbursement or realization to the target recipients of the budget. In addition, there is

also an evaluation process for managing village funds, which consists of an evaluation process, coordination and consultation mechanisms, roles in the village as community members, knowledge of village funds and village fund management. The suggestions that can be given are the need to increase competence through internal socialization to each stakeholder who has an interest in managing village funds, the need to revise the mechanism and flow of village fund management at the village level so that budget realization reaps community satisfaction as a target and the need for transparency regarding the evaluation of the use of village funds.

Keywords: *Implementation, Management, Program, Budget Realization.*

A. Pendahuluan

Desa Ria Bao merupakan salah satu desa di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menerima bantuan anggaran pembangunan desa dari pemerintah. Besar anggaran yang diterima oleh Desa Ria Bao, menuntut pemerintah desa dan aparat desa agar transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas, dan prioritas dalam mengelola dana tersebut. Sebab dengan jumlah masyarakat desa sebanyak 629 jiwa yang tersebar dalam 180 Kepala Keluarga dengan rincian mata pencaharian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 orang, Wiraswasta 16 orang, Petani 248 orang, Tukang Bangunan 12 orang, Pensiunan 14 orang, Nelayan 5 Orang, Peternak 25 Orang, Pelayanan Jasa 2 orang, Pengrajin 33 orang, dan pengangguran 77 orang (Data Desa Ria Bao, 2020), bukanlah hal mudah dalam mengimplementasi pengelolaan anggaran tersebut. Dengan keadaan demikian muncul berbagai hambatan dan tantangan baik yang dialami oleh pemerintah desa maupun

masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa dengan besarnya anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah menjadi pemicu dalam berbagai penyelewengan dana desa atau pemicu terjadinya tindakan korupsi, seperti kasus yang terjadi pada bendahara Desa Nubalema Dua, kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur yang ditahan Kejaksaan Negeri Flores Timur akibat dugaan korupsi sebesar Rp. 261 juta, kasus penahanan kepala desa Botof, kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) yang diduga terlibat kasus korupsi anggaran dana desa sebesar Rp. 2,1 miliar, kasus mantan kepala desa Lakamola, Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao yang dihukum 3 Tahun penjara akibat kasus korupsi dana desa sebesar Rp. 400 Juta. (Sumber: kompas.com).

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa belum sepenuhnya maksimal. Dengan besarnya anggaran, membuat aparat desa berpeluang terjadinya penyelewengan dana yang dikelola di desa. Pemicu terjadi tindakan penyelewengan dana ini adalah sistem dan mekanisme

pengelolaan dana desa yang belum maksimal, pengawasan dan pengontrolan dari masyarakat desa yang belum maksimal sehingga menjadi hambatan – hambatan yang perlu dibenahi secara lebih baik. Adapun beberapa hambatan diantaranya seperti cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang belum maksimal dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat desa tanpa melalui identifikasi kebutuhan masyarakat desa, mekanisme atau prosedur yang dijalankan pada kategori tidak sesuai prosedur dan juknis, penempatan personalia yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Hambatan dan tantangan lainnya adalah perencanaan-perencanaan pemerintah desa, dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dan keuangan asset desa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tidak melibatkan komponen-komponen masyarakat namun lebih banyak ditangani oleh kepala desa sendiri. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pasal 127 ayat (1) tentang pelaksanaan penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa dan untuk mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya.

Akan tetapi kenyataan di lapangan hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati.

Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa yang seharusnya berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat baik berupa selebaran, papan informasi, pengumuman atau melalui rapat-rapat tidak dilakukan oleh kepala desa. Hambatan-hambatan ini didukung dengan sering keterlambatan dalam penyaluran dana desa yang mengakibatkan segala perencanaan dan pelaksanaan seringkali terlambat. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran dana desa yang terlambat dan tidak sesuai dengan proses serta jadwal dalam perencanaan.

Dengan berbagai hambatan yang ada ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata dalam hal pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan semua sumber daya alam dengan prinsip kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan dasar dari, oleh dan untuk masyarakat, seluruh kegiatan harus mampu dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum serta dapat mengandung prinsip hemat, terarah dan terkendali dan kegiatan yang didanai dana desa harus meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain membentuk pola pikir masyarakat desa agar mau maju dan berkembang, sering terjadi miskomunikasi dengan masyarakat mengenai rencana

perubahan yang direncanakan tidak diterima oleh masyarakat desa, dan kepedulian mereka terhadap perkembangan dan kemajuan desa (Sumber: *Pendamping Desa Ria Bao, 2020*). Selain itu, akurasi data masyarakat yang belum maksimal sesuai keadaan masyarakat yang sebenarnya, latar belakang pendidikan perangkat desa, regulasi maupun kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak sesuai dan terlambat setelah diadakannya musrembang, dan diskoneksi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah serta data yang diterima aparat desa dari RT/RW tidak semuanya akurat sehingga pemerataan bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran (Sumber: *Sekretaris dan masyarakat Desa Ria Bao, 2020*).

Hasil Penelitian

A. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao

Implementasi dana desa merupakan pelaksanaan dalam sistem pengelolaan dana desa yang dapat mencakup komunikasi, sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, komitmen serta birokrasi. Tahapan tersebut juga ada dalam sistem pengelolaan dana desa di Desa Ria Bao. Tahapan tersebut di antaranya yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah cara mentransfer, menginformasikan dan menggali gagasan-gagasan yang ada di masyarakat guna penyusunan RKPDes yang berkaitan dengan dana desa.

Komunikasi selalu diawali dengan penggalian gagasan dari masyarakat. Mengkomunikasikan merupakan cara dalam menyampaikan informasi, menanggapi gagasan atau ide-ide yang ditampung dari masyarakat sebagai acuan dalam penyusunan RKPDes. Komunikasi dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara bertahap dengan didahului oleh penggalian berbagai gagasan, kebutuhan dan keinginan masyarakat di tingkat dusun, sehingga memperoleh perencanaan-perencanaan yang akan dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan RKPDes di tingkat desa. Dengan kata lain RKPDes lahir dari gagasan-gagasan yang ada pada masyarakat dimana memuat sejumlah perencanaan yang akan diverifikasi dan ditetapkan oleh pemerintah desa yang selanjutnya dijadikan sebagai RAB untuk pengajuan pencairan dana ke tingkat kecamatan dan kabupaten hingga ke pemerintah pusat. Dalam mengkomunikasikan perencanaan anggaran dana desa dari pemerintah desa/aparat desa kepada masyarakat desa maupun sebaliknya tidak terlepas dari berbagai bentuk miskomunikasi yang sering terjadi baik berupa kritikan, saran maupun sanggahan yang dilontarkan oleh masyarakat desa terhadap informasi dan perencanaan yang diberikan oleh pemerintah desa/aparat desa. Untuk itu sebagai aparat desa/

pemerintah desa perlu menanggapi/ menyikapi berbagai bentuk kritikan, saran dan sanggahan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk miskomunikasi sering terjadi karena perbedaan pemikiran dan pandangan. Miskomunikasi terjadi karena kurangnya pemahaman-pemahaman dalam mengelola dana desa. Selain itu, dalam mengkomunikasikan, kritikan, saran bahkan sanggahan yang diberikan kebanyakan datang dari ketidakpuasan masyarakat akan ide/gagasan yang telah disampaikan tidak dapat diakomodir dalam perencanaan yang melibatkan anggaran dana desa. Akan tetapi semua bentuk sanggahan tersebut belum pernah terjadi akan adanya penolakan. kritikan, saran dan sanggahan dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan latar belakang pemerintah desa telah melakukan penggalian gagasan kepada masyarakat akan tetapi semua gagasan tersebut tidak semuanya diakomodir dalam perencanaan anggaran dana desa sehingga terjadi bentuk kritikan, saran dan sanggahan dari masyarakat dengan sudut pandang dan pemahaman masyarakat. Sedangkan dalam menyikapi bentuk kritikan, saran bahkan sanggahan yang dilakukan oleh masyarakat adalah memberikan pemahaman, keterbukaan informasi yang terperinci bahkan memanggil pihak- pihak terkait untuk bersama-sama

mendiskusikan persoalan yang ada. Disisi lain semua sanggahan harus mampu diterima oleh aparat desa/pemerintah desa sebagai kritik dan saran yang membangun agar kesemuanya tidak terjadi penolakan akan perencanaan-perencanaan yang ada.

2. Sumber Daya

Dalam kaitannya dengan implementasi dana desa pada ranah sumber daya baik sumber daya manusia sebagai motor penggerak dan pelaksana berbagai kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah desa adalah pengeloan sumber daya manusia yang ada guna kemajuan desa. bahwa sumber daya manusia yang ada berasal dari APBDes, Dana Desa, DAD, Hasil Pajak dan Retribusi yang merupakan umpan balik dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa Ria Bao. Sementara itu diketahui bahwa pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilatarbelakangi oleh Sumber Daya Alam (SDA) sebagai motor penggerak yang masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Dalam mendukung keterlaksanaan dan ketercapaian Sumber Daya Manusia (SDM) perlunya dukungan yang mampu memberikan sumbangsi terhadap kemajuan dan perkembangan desa.

pemanfaatan sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia sebagai motor penggerak sudah mulai

berkembang dan mulai mengalami kemajuan untuk regenerasi dalam pengelolaan dana desa. Pemanfaatan sumber daya baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia tergantung pada sumber daya manusia sebagai motor perencana dan penggerak dan sumber daya alam sebagai lahan yang dikembangkan. Dengan demikian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada perlunya pengkajian untuk mensinergikan sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia yang ada dalam tujuan pengelolaan dana desa demi kemajuan desa. Dilihat dari sisi dampak nyata (positif) dengan adanya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya maka ditemukan berbagai dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat desa dengan keterkaitannya pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Dampak positif dari adanya dana desa telah dirasakan oleh masyarakat Desa Ria Bao, sehingga dalam hal ini pemanfaatan anggaran dana desa untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Pemanfaatan dana desa dalam tatanan pengelolaan dana desa telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Secara keseluruhan dampak positif tersebut diperuntukkan untuk pembangunan fisik (infrastruktur) dalam desa seperti rabat jalan, posyandu/ polindes dan bantuan perumahan bagi masyarakat pada kategori tidak mampu. Dampak yang timbul

dari adanya pengelolaan dan realisasi anggaran dana desa sudah menunjukkan ada dan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam proses pengelolaan dana desa merupakan suatu langkah atau upaya bagaimana realisasi anggaran yang ada dapat menstimulus dan memberikan daya dukung terhadap perkembangan baik pemberdayaan, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam menyikapi ini perlunya konsistensi terhadap pemanfaatan anggaran itu sendiri, komitmen dalam tatanan memiliki dampak atau manfaat yang positif bagi sasaran realisasi anggaran yang ada.

3. Komitmen

Komitmen dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa. Implementasi pengelolaan dana desa berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam menunjuk pendamping desa untuk menjalankan program merealisasikan anggaran agar dapat dipertanggung jawabkan. Setelah suatu komitmen dan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang ada di Desa Ria Bao, perlunya mempertimbangkan asas birokrasi yang ada dalam mekanisme pengelolaan anggaran dana desa. Dengan dasar pelaksanaan tugas dalam pengelolaan dana desa maka kaitannya dengan birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendamping

desa dalam tatanan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa. Peran serta pendamping desa dalam tatanan birokrasi pemerintah desa yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendamping adalah memberikan pendampingan terkait mekanisme dan cara pengelolaan anggaran dana desa yang ada, berbagai kesulitan dan tantangan yang dialami oleh pemerintah Desa Ria Bao dengan tetap ikut merencanakan, mengawasi serta terlibat dalam proses evaluasi terkait realisasi anggaran dana desa.

B. Peran Dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab merupakan kaitan di tupoksi baik dari aparat desa dalam hal ini pemerintah desa, pendamping desa dan juga masyarakat sebagai pemangku sasaran kebijakan dana desa. Sebagai bagian dari sasaran dana desa maka perlunya pengelolaan dana desa yang dilandaskan pada kepentingan masyarakat desa dalam mencapai tujuan pembedayaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam mengemban tugas sebagai aparat desa/pemerintah desa, pendamping desa maupun masyarakat desa perlunya mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Secara struktural peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder sudah diatur dalam berbagai peraturan dan juknis yang ada. Dalam teknis

pelaksanaanya mengimplementasikan peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder merupakan tugas dari aparat pemerintah Desa Ria Bao yang dibagi dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang (tupoksi). Dari hasil wawancara dan kaitannya dengan implementasi pengelolaan dana desa melibatkan pemerintah desa sebagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan pengguna anggaran yang dijalankan melalui mekanisme dan petunjuk teknis yang ada. Selain pemerintah desa ada juga pendamping desa sebagai bagian dari pengelolaan dana desa. Peran utama dari pendamping desa adalah memfasilitasi hubungan masyarakat dengan pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa. Disilain peran masyarakat adalah memantaudan mengawasi pelaksanaan implementasi dana desa yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Dari hasil wawancara berkaitan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder yang ada pelaksanaan peran, tugas dan tanggung jawab sudah sesuai dengan struktural yang ada. Akan tetapi pelaksanaan teknis sering memicu terjadinya miskomunikasi yang berkaitan dengan kebijakan dan arahan antara pemerintah desa dengan masyarakat maupun sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari kurang puasanya masyarakat terhadap arah kebijakan dan tata kelola serta pelaksanaan melalui anggaran dana desa yang

terkesan belum maksimal secara tepat sasaran, kepentingan mendesak (urgen) dan realisasi program sesuai sewaktu penggalan gagasan di tingkat dusun.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder yang ada sudah sesuai dengan struktural, peraturan-peraturan dan petunjuk teknis yang ada akan tetapi kendala yang sering dihadapi adalah terjadinya miskomunikasi pada tingkat teknis pelaksanaan yang menuai kritikan, saran serta perlunya solusi konkrit dalam pemecahan masalah. Sementara itu langkah yang diambil dalam menyikapi situasi tersebut adalah melakukan konsultasi secara berjenjang guna memperoleh solusi yang relevan.

1. Pemerintah Desa Ria Bao

Peran dan tanggung jawab pemerintah beserta aparat Desa Ria Bao dalam mengimplementasi pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, agar realisasi anggaran dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tupoksi pemerintah Desa Ria Bao dalam hal ini merupakan tanggung jawab masing-masing perorangan yang dilimpahkan kepada setiap personal dengan dasar struktur organisasi yang ada di desa. Dengan kata lain selain mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang sudah tersistem, ada juga tugas tambahan yang diberikan oleh

kepala desa sebagai penanggung jawab pelaksana semua kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, tugas dan tanggung jawab tentang alur kerja dan mekanisme yang dibagikan selain dari sistem ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup pemerintahan desa. Sehingga dalam lingkup kerja tersebut masing-masing personal sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya.

2. Kesulitan Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawab

Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem pemerintahan desa pemerintah desa dalam hal ini sering mengalami tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas. Ada beberapa kesulitan yang dirasakan selama menjalankan tugas sebagai aparat desa/pemerintah desa sehingga dalam menjalankan tugas sering mengalami kendala. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat desa/pemerintah desa tidak terlepas dari kesulitan yang dihadapi. Dalam hal ini kesulitan terbesar adalah menghadapi karakter masyarakat yang berbeda-beda secara pemikiran dan pemahaman dengan latar belakang pendidikan yang

berbeda-beda pula. Sehingga dalam menghadapi kesulitan ini maka perlunya menyikapi kesulitan-kesulitan yang ada. Dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat desa/pemerintah desa maka dilakukan konsultasi dan koordinasi secara berjenjang guna memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Dengan kata lain konsultasi dan koordinasi ke tingkat yang lebih tinggi yakni ke dinas-dinas terkait untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada.

C. Pengelolaan Dana Desa Ria Bao

Pengelolaan dana desa merupakan alur, cara dan mekanisme yang digunakan untuk pemanfaatan dana desa guna memenuhi sasaran anggaran dana desa (masyarakat). Guna pengelolaan yang transparan, akurat dan tepat sasaran maka perlunya sistem pengelolaan anggaran dana desa yang mengacu pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pengelolaan anggaran dana desa peran serta keterlibatan semua pihak terkait (aparat desa/pemerintah desa dan pendamping desa) sebagai pemangku pengelolaan anggaran dana desa mempunyai fungsi mengimplementasikan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu peran serta

masyarakat dalam pengelolaan dana desa memberikan fungsi perencanaan melalui penggalian gagasan/ide serta terlibat secara aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa yang ada. Dengan demikian maka keaktifan semua pihak menjadi kunci dalam suksesnya pengelolaan dana desa.

Dalam struktur pemerintahan Desa Ria Bao memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah desa. Dalam hal ini kepala desa sebagai pemangku kepentingan dan pengguna anggaran. Implementasi pengelolaan dana desa merupakan tugas aparat pemerintah desa yang dipercayakan pemerintah pusat untuk mengelola dana desa. Berdasarkan hasil wawancara memperlihatkan bahwa transparansi dalam hal penggunaan anggaran dana desa cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap realisasi anggaran dana desa dengan mekanisme pelaporannya sangat transparan terhadap seluruh masyarakat desa dengan berbagai cara seperti pemasangan baliho yang memuat pendapatan maupun penggunaan anggaran, diinformasikan secara terbuka terhadap masyarakat. Namun beberapa hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat terdapat banyak kritik yang mengatakan bahwa transparansi sudah baik hanya saja saat perencanaannya dan realisasinya tidak dilaporkan secara terbuka.

Dalam hal pengelolaan dana desa menurut Arif (2007:32)

mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata secara perencanaan, penganggaran, penatausahaan sudah baik namun secara pelaporan dan pertanggungjawaban internal desa dalam hal ini pelaporannya bersifat transparansi penggunaan anggaran belum sepenuhnya menuai kepuasan dari masyarakat. Hal ini dapat dipicu oleh fungsi kontrol dan pengawasan yang belum secara maksimal dilakukan, maupun mekanisme pelaporan terhadap masyarakat dalam hal transparansi penggunaan anggaran dana desa belum sepenuhnya baik.

Sementara itu berkaitan dengan keterlibatan masyarakat perencanaan terhadap realisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses perencanaan melalui penjangkaran informasi dan pendapat tingkat dusun yang selanjutnya dapat dimusyawarakkan di tingkat desa. Dari segi evaluasi ada sebagian masyarakat yang dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut dan ada juga yang tidak dilibatkan dalam proses evaluasi

tersebut. Hal ini dapat terjadi karena miskomunikasi yang dibangun antara pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga banyak menuai kritikan masyarakat sebab tidak dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut. Tepat tidaknya realisasi anggaran dalam hasil wawancara dijelaskan bahwa sebagian besar sudah tepat sasaran karena sudah sesuai dengan juknis dan peraturan-peraturan yang diberlakukan. Akan tetapi dalam ruang lingkup pengelolaan dana desa sering terlambat namun tetap direalisasikan, sementara dana yang diperuntukan untuk kegiatan yang tidak dapat direalisasikan akan dimasukkan dalam SILPA. Dilihat dari sudut pandang proses penyaluran dana desa yang ada di Desa Ria Bao memperlihatkan bahwa ada berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keterlambatan dalam pelaporan sehingga proses pencairan yang dilakukan dalam tiga tahap tidak sesuai lagi dengan waktu yang ada dalam perencanaan dimana tuntutan dari pemerintah tingkat atas sering menjadi pemicu keterlambatan dalam proses pencairan.

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

pembangunan fisik, kesehatan, pendidikan, air minum, sanitasi berbasis masyarakat, bangunan kawasan pemukiman, peningkatan UMKM, penyertaan modal di BUMDes. Dalam pelaksanaan program ini didasarkan pada hasil verifikasi

dan penetapa dalam APBDes yang telah disetujui oleh semua pihak terkait. Sejauh ini diketahui bahwa program-program yang disusun oleh pemerintah desa atau aparat desa didasarkan pada kondisional Desa Ria Bao. Program-program tersebut dijalankan oleh pemerintah Desa Ria Bao dan lebih ditekankan pada pembangunan fisik, pemberdayaan dan penanggulangan bencana covid-19. Kesemuanya merupakan program-program utama yang dijalankan oleh aparat desa/pemerintah desa melalui realisasi anggaran dana desa.

D. Hambatan Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Alur penyusunan program yang dilakukan oleh aparat desa atau pemerintah desa Ria Bao dimulai dengan menggali aspirasi dari masyarakat pada tingkat dusun, kemudian dibawa ke tingkat desa sebelum akhirnya dilakukan MUSREMBANGDes untuk penetapan berbagai aspirasi masyarakat menjadi RKPDes dan APBDes. Penyusunan program tidak terlepas dari peran serta pemerintah desa/aparat desa dalam menjalankan program-program yang telah disusun tersebut. Dengan demikian pelaksanaan sebuah program yang dianggarkan dari dana desa memiliki tata cara dalam pengelolaannya.

Program-Program Anggaran Dana Desa

Program-program dari anggaran dana desa seperti Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam proses implementasi pengelolaan dana desa mulai dari

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, realisasi, pengawasan dan evaluasi tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Menurut Prayetno (2015:584) mengatakan bahwa hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam diri sendiri (internal) yang memiliki sifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumen terhadap pengelolaan dana desa di Desa Ria Bao memperlihatkan bahwa terdapat hambatan baik secara eksternal maupun internal. Hambatan eksternal dalam pengelolaan dana desa yaitu secara keseluruhan tidak adanya peng gagasan ide yang dilakukan dari tingkat bawah sehingga perumusan perencanaan dan penganggaran tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berjenjang. Sementara itu hambatan internalnya adalah hambatan yang berasal dari aparat desa itu sendiri dimana minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih tergolong kaku dalam hal pengelolaan. Selain itu mekanisme pelaporan yang sering terlambat, pembuatan realisasi program dan kegiatan yang terkesan lambat karena banyak dokumen pelaporan yang harus disiapkan, dan banyaknya aturan yang selalu berubah-ubah sehingga membuat keterlambatan mulai dari proses pencairan anggaran dan realisasi, serta adanya masa pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak dalam menjalankan beberapa kegiatan bahkan tidak dapat direalisasikan.

Dalam menyikapi hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa langkah yang paling solutif

adalah melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang dari tingkat desa hingga pemerintah atau instansi terkait. Sehingga diperoleh petunjuk dalam menyikapi berbagai hambatan dan tantangan dimana dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis atau juknis maupun aturan-aturan yang ada. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan-hambatan seperti keterampilan, kemampuan dan pemahaman internal dari personalia yang mengelola dana desa belum sepenuhnya memahami alur dan mekanisme dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu dalam proses penyaluran dana desa diketahui sering mengalami hambatan dimana proses perencanaan di tingkat kabupaten melibatkan berbagai perencanaan semua desa sehingga membuat segala proses yang sudah direncanakan sejak awal sering terlambat.

Hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Ria Bao Kabupaten Lembata adalah peraturan-peraturan yang sering berubah-ubah, mekanisme dan pelaporan yang tergolong rumit serta tatanan tingkat desa yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara maksimal mengenai proses pengelolaan dana desa sehingga dalam perjalanannya sering mengalami keterlambatan. Selain itu juga dengan adanya hambatan-hambatan eksternal seperti masa pandemi covid-19 membuat batasan-batasan ruang gerak pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan program kerja sesuai perencanaan sehingga menuai keterlambatan dalam pelaporan.

Adapun hambatan tingkat bawah dalam hal ini teknis yang ada pada aparat pemerintah desa juga turut mempengaruhi realisasi anggaran kepada masyarakat maupun pertanggung jawaban ke tingkat atau instansi yang memiliki kepentingan lebih tinggi.

Tantangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Proses implementasi pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, realisasi, pengawasan dan evaluasi berkaitan dengan dana desa tidak terlepas dari tantangan. Menurut Prayetno (2015:584) mengatakan bahwa tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengunggah kemampuan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumen terhadap pengelolaan dana desa di Desa Ria Bao memperlihatkan bahwa tantangan dalam pengelolaan dana desa adalah kesiapan dokumen, yang dengan kata lain kesiapan dokumen menjadi kunci realisasi anggaran dana desa. Proses penyaluran sering terhambat karena banyaknya proses dan persyaratan yang harus dilalui hingga pencairan ke rekening desa. Hal ini terkadang membuat aktivitas proses dalam melengkapi berkas-berkas persyaratan menjadi lama dan berdampak pada proses pencairan. Selain itu aparat desa belum sepenuhnya memahami mekanisme serta alur dalam proses pengelolaan dana desa. Personalia aparat desa yang ada masih memiliki kemampuan terbatas dimana pemahaman maupun kompetensi dalam pengelolaan dan kesiapan

dokumen sering membutuhkan banyak pendampingan sehingga cukup memakan waktu. Hal tersebut dapat berdampak pada keterlambata proses pencairan dana dan kesiapan dokumen. Tantangan utama dalam pengelolaan dana desa di mulai dari perencanaan hingga evaluasi adalah tergantung pada kesiapan dokumen penunjang sebagai persyaratan dalam proses pencairan dana desa yang selanjutnya dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

E. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan anggaran yang diperuntukan untuk desa dalam hal ini masyarakat desa sebagai sasaran utama dana desa. Tujuan dari adanya dana desa adalah untuk mendongkrak dan memberikan bantuan guna pertumbuhan desa secara finansial maupun fisik. Dalam pengelolaan dana desa peran serta masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa sangatlah penting. Untuk itu masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pengelolaan dan realisasi anggaran dana desa. Dari hasil wawancara terhadap masyarakat dengan beberapa indikator pertanyaan yaitu:

Peran Di Desa Sebagai Anggota Masyarakat

Peran di desa sebagai anggota masyarakat adalah ikut terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran dana desa yang ada di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Dari hasil

wawancara dengan beberapa masyarakat desa diketahui bentuk- bentuk keterlibatan dalam kegiatan- kegiatan atau program-program dana desa. Sebagai anggota masyarakat Desa Ria Bao dalam hal ini peran dan keterlibatan di desa sebagai anggota masyarakat bervariasi bergantung pada latar belakang pekerjaan masing-masing. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Ria Bao cukup antusias dalam keterlibatannya sebagai anggotamasyarakat.

Pengetahuan Tentang Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Ria Bao perlunya sosialisasi terkait apa itu dana desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui peruntukan dana desa. Dengan demikian diharapkan bahwa masyarakat dapat memahami secara baik berkaitan dengan dana desa. Menurut masyarakat dana desa adalah dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat desa melalui pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat daerah, kecamatan hingga ke pemerintah desa sebelum direalisasikan kepada masyarakat desa. Tujuan utama adanya dana desa adalah untuk masyarakat desa sebagai stimulus dalam upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dengan adanya dana desa diharapkan dapat memberikan stimulus guna

peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga dengan demikian perlunya tatanan pengelolaan yang baik sehingga agar bisa dinikmati masyarakat desa. Sehingga dalam implementasinya berbagai kegiatan telah direalisasikan oleh pemerintah sebagai pengelola dana desa. berbagai kegiatan telah diselenggarakan pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa dan dalam upaya peningkatan kapasitas taraf hidup masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dengan adanya dana desa antara lain bantuan kelompok tani, ikat tenun, bantuan inovasi desa dan berbagai kegiatan lain yang diperuntukan untuk kepentingan bersama masyarakat Desa Ria Bao.

Berbagai kegiatan yang dilakukan melalui dana desa dengan peruntukan untuk masyarakat desa selanjutnya mendapat tanggapan berkaitan dengan kepuasan masyarakat desa baik cara pengelolaan hingga kegiatan-kegiatan yang telah

dijalankan. Masyarakat Desa Ria Bao belum sepenuhnya merasa puas dengan pengelolaan dan realisasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Ria Bao sebab dinilai belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran serta implementasinya berbeda dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam tatanan pengelolaan dan

implementasi terhadap pengelolaan dana desa sehingga pengaruh tersebut dapat memberikan pengaruh positif atau pengaruh negatif. ada perubahan positif yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan pengaruh positif bagi masyarakat Desa Ria Bao sebagai penunjang peningkatan taraf hidup.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa berkaitan dengan mekanisme dan teknis pengelolaan yang turut melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ria Bao. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlunya memperhatikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ria Bao. Pengelolaan dana desa belum terlalu transparansi berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi yang belum maksimal sehingga belum menuai keterbukaan yang maksimal. Dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ria Bao maka keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang implementasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan evaluasi berkaitan dengan dana desa.

Secara umum masyarakat desa Ria Bao dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi

yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa perlunya memperhatikan mekanisme penyaluran dana desa tersebut sehingga dapat dilihat tepat tidaknya sasaran dan sesuai tidaknya dengan perencanaan yang telah dibuat. Penyaluran dana desa itu baik adanya akan tetapi penyaluran kepada masyarakat yang belum sepenuhnya maksimal. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa penyaluran dana desa belum sepenuhnya tepat sasaran. Dalam implementasinya kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan memiliki berbagai dampak atau kendala yang dihadapi sebagai bagian dari tantangan dalam pengelolaan dana desa. Kendala yang sering dihadapi dalam proses penyaluran dana desa adalah banyaknya keperluan data pendukung, laporan pertanggung jawaban yang terlambat dengan imbas kegiatan-kegiatan kadang tidak sesuai lagi dengan jadwal yang telah dibuat dalam perencanaan.

F. Kesimpulan Dan Saran

Dana desa merupakan dana yang diperuntukan untuk desa untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Implementasi dana desa merupakan realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan tingkat bawah dalam hal ini aparat desa/pemerintah desa dan diperuntukan untuk masyarakat desa. Hambatan

dalam pengelolaan dana desa di Desa Ria Bao merupakan hambatan internal seperti minimnya SDM, pelaporan dan pertanggungjawaban yang lambat karena peraturan-peraturan yang selalu berubah-ubah yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan laporan serta masa pandemi covid-19 yang membuat banyak hambatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dianggarkan dalam dana desa. Tantangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Ria Bao adalah keterlambatan kesiapan dokumen akibat regulasi anggaran yang berubah-ubah sehingga proses realisasinya tidak sesuai dengan jadwal perencanaan sebelumnya.

Dalam pengimplementasi pengelolaan dana desa di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata harus dibenahi dan diperhatikan dengan berdasarkan pada perlunya peningkatan kompetensi melalui sosialisasi internal terhadap setiap stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan dana desa. Perlunya merevisi mekanisme dan alur pengelolaan dana desa pada tingkat desa sehingga realisasi anggaran menuai kepuasan masyarakat sebagai sasaran realisasi anggaran dana desa. Selain itu juga perlunya transparansi terkait evaluasi dalam penggunaan anggaran dana desa dimana tidak hanya saat perencanaan saja tetapi saat evaluasi anggaran yang terrealisasi dan yang tidak terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD PostPress.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prayetno, Adi. 2015. *Kerja Sama Komunitas Asean 2015 Dalam Menghadapi ATH (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan)*. Prosiding Seminar Nasional 26 Agustus 2015. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Terbuka.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo